

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asra, 2015, *Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Bryan A. Garner, et.al., 2004, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fred B.G. Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ismail Rumadan dkk., 2003, *Laporan Penelitian Interpretasi Tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" Dalam Perkara Kepailitan*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 1992, *Pokok-pokok Rumusah Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
- Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahadi, 2003, *Filsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksanaan RI Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta,
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Notonegoro, 1961, *Pancasila Falsafah Negara*, Airlangga, Surabaya
- Noto Hamidjoyo, 2006, *Demi Kemanusiaan dan Keadilan dalam Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (himpunan makalah)*, Tatanusa, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, Malang.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Varia Yustisia*, Bandung.
- Rivai Wirasasmita, et.al, 2002, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Akumni, Bandung.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordeningdening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sumadji P, et.al, 2006, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap*, Wilpress, Makassar.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesril Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksananya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Zainal Asikin, 2003, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- H.I.R (*Herzian Inlandsch Reglement*).
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000 *tentang Permohonan Pailit Demi Kepentingan Umum*.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/JA/12/2010 *tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN)*.

### **C. Makalah, Artikel, Jurnal**

Agussalim Nasution, 2008, *Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ari Purwadi, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank yang Bermasalah*, Perspektif Vol. 16. No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.

Bekti Wicaksono, 2014, *Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fred BG. Tumbuan, 2005, *Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No: 14 K/N/2004 Jo. No. 18/Pailit/Pniaga/Jkt.Pst*, dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Negeri Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta.

Hilda Ainy Apriliansy, 2019, *Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Uum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019.

Imam Akbar Dinata, 2020, *Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Riska Wijayanti dan Siti Malikhatun Bariyah, Tanpa Tahun, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang.

Marwan Effendy, 2009, *Peran, Visi, Misi dan Strategi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia "evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 Tahun 2004 dengan penekanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pakta integritas"*, Makalah Rapat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Pekanbaru Riau, Rabu 29 April 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari.

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Narendra Jatna Asisten Khusus Jaksa Agung pada tanggal 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Erick Muskita Advokat, Kurator & Pengurus pada tanggal 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan Feby Gumilang Gunawan Kasiepidus Kota Cimahi pada tanggal 26 Oktober 2020.

Wawancara dengan Mira Sylvania Advokat, Kurator & Pengurus pada tanggal 27 Oktober 2020.

## **E. Internet**

Devina Halim, *Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan Kembali* *Aset* *Korban*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/18/20593861/kasus-first-travel-kejaksaan-agung-janji-buat-terobosan-untuk-kembali>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Puan Adria Ikhsan, *Contoh Kasus: Pemohon Pailit Demi Kepentingan Umum*,  
<http://iniprolog.blogspot.com/2017/06/contoh-kasus-pemohon-pailit-demi.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Nanda Narendra Putra, *First Travel Masuk PKPU Tetap, 'Pihak Ketiga' Akan Berangkatkan* *60* *Ribu* *Jamaah*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d61e79dc3a2/first-travel-masuk-pkpu-tetap--pihak-ketiga-akan-berangkatkan-60-ribu-jamaah/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), diakses pada tanggal 28 September 2020.